



Mantan Pejabat Kuasai Aset

■ Pemprov Mantapkan ASN Kelola Barang

PONTIANAK, TRIBUN - Mantan pejabat Pemerintah Provinsi Kalbar diketahui masih menguasai beberapa aset tak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah. Mereka menguasai aset-aset tersebut tanpa prosedur dan izin yang jelas sehingga merugikan keuangan negara. Hal ini disampaikan Kabiro Pengelolaan Aset Pemprov

Kalbar, Linda Purnama usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Barang Milik Daerah se Provinsi Kalbar di Hotel Mahkota, Kamis (1/8). Ia menyebutkan saat ini sekitar lima persen aset Pemprov Kalbar masih bermasalah dan dikuasi pribadi mantan pejabat. Lanjut disampaikannya aset yang yang ini akan terus dilau-

kukan upaya pengamanan, sementara Pemprov Kalbar bekerja sama dengan KPK untuk mengamankan aset tersebut. "Kami juga sudah diarahkan dengan aparat penegak hukum. Secara administrasi, semuanya sudah diberikan teguran. Bila dalam waktu dekat tidak ada respon mengembalikan, maka akan dilakukan tindakan represif," tandas Linda Purnama.



TRIBUN/FILE
Linda Purnama

Ia menegaskan akan mengamankan aset-aset Pemprov Kalbar yang berupa lahan dan rumah dinas yang masih dikuasai pribadi. Bahkan di Pontianak ada beberapa rumah dinas yang masih dihuni mantan Ketua DPRD dan baru saja dikosongkan, diamankan. Pihaknya juga ingin memetakan dan mengidentifikasi aset-aset Pemprov Kalbar yang digunakan oleh kabupa-

ten kota. Kemudian sebaliknya ada aset daerah tingkat dua yang digunakan Pemprov Kalbar sehingga itu harus di-genahkan. Berdasarkan aturan yang ada, menurutnya aset pinjam pakai sesama pemerintah itu hanya dibenarkan lima ta-

hun dan sekali perpanjangan. Setelah itu, harus ada kebijakan sehingga aset yang pinjam pakai ini tidak membawa masalah.

Selanjutnya di lingkungan OPD sendiri, pihaknya ingin melakukan konsolidasi penerbitan aset. Terkait dengan pencatatan, pengamanan sehingga aset hang ada bisa dikelola dengan sebaik-baiknya.

"Kita juga ingin menstresing kawan-kawan di OPD dalam rangka penggunaan sistem aplikasi sesuai arahan Guber-

■ Bersambung ke hal. 11



nur Kalbar. Ke depan masyarakat bisa mengetahui aset Pemprov Kalbar dengan mengklik di sistem yang dibangun," ucapnya

Sementara itu, rakor soal aset pemprov ini selain dihadiri Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin juga dihadiri Gubernur Kalbar Sutarmidji. Ia menegaskan kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan para Aparatur Sipil Negara sehingga mampu mengelola barang daerah. Midji menegaskan, pemanfaatan uang dan memaksimalkan fungsi aset adalah hal yang paling penting.

"Hari ini kita melakukan rapat kordinasi untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran dan mengoptimalkan aset-aset daerah yang ada sehingga bisa memberikan pemasukan," ucap Sutarmidji.

Ia membahas dalam memaksimalkan pemanfaatan anggaran pengadaan barang setiap tahunnya harus mementingkan kepentingan masyarakat.

Selama ini, jajaran pemerintahan disebut Midji, selalu melihat dirinya sendiri, apa yang bisa didapat birokrat dari setiap belanja yang ada. "Mereka tidak melihat apa yang harus diperoleh dan didapatkan masyarakat," tukas Midji.

Menurutnya harusnya seorang pejabat berpikir bagaimana program dan belanja daerah yang dilakukan bisa membuat masyarakat hidup lebih sejahtera dan lebih nyaman.

"Jarang pejabat kita berpikir seperti itu, pola pikir yang salah. Mereka mengutamakan apa yang didapat oleh birokrat. Hal ini membuat setiap tahunnya belanja pegawai dan belanja tidak langsung di pemerintahan selalu membengkak," tegasnya.

Itu disebabkan para pegawai dan pejabat yang membuat program dan menyusun anggaran selalu memikirkan apa yang dirinya dapat dan tidak memikirkan dampak terhadap masyarakat.

"Saya berikan contoh, sewaktu saya jadi Gubernur Kalbar, hal pertama yang

saya lakukan terkait anggaran adalah menanyakan pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Pak Samuel, berapa biaya perjalanan dinas selama satu tahun," ujarnya.

Kala itu Kepala BPKPD menjawab setahun perjalanan dinas di provinsi mencapai Rp 244 miliar.

"Begitu tahun anggaran 2019 dan menyusunnya di tahun 2018, saya tegaskan anggaran itu harus dijadikan Rp140 miliar dan Rp 104 miliar kita alokasikan untuk memberikan beasiswa kepada 142 ribu anak SMA dan SMK negeri," tambahnya.

Kemudian dia tanya lagi pada Kadisdikbud, Supriamus apakah masih ada sisa anggaran Rp104 miliar itu, ia menjawab masih. Midji langsung minta dia belikan meubeler sekolah dan dapat 20 ribu set.

"Hal itu baru satu perjalanan dinas yang dilakukan efisiensi. Kemudian dari Rp140 miliar karena seluruh surat perjalanan dinas ditandatangani gubernur semua dan harusnya dua

triuwan pertama harusnya Rp70 miliar tapi saat ini nyatanya baru Rp 30 miliaran yang terpakai," ucapnya.

Maka masih akan ada penghematan dari jumlah penganggaran sekitar Rp 30-50 miliar lagi untuk perjalanan dinas. Kemudian terkait pengelolaan aset yang ada di Kalbar, midji menekankan harus benar-benar memberikan manfaat dan bisa memberikan pemasukan bagi daerah.

Kemudian ia menegaskan ada hal yang harus dilakukan yaitu efisiensi dalam penanganan dan pencatatan aset. Dengan sistem accrual saat ini lebih repot karena menghitung penyusutan, penambahan nilai dan sebagainya.

"Orang-orang di bagian pencatatan aset akan semakin repot, nah saya ambil contoh terkait kendaraan. Kendaraan harusnya tidak usah banyak-banyak lagi, saya akan buat seperti di Kota Pontianak nanti. Saya akan tambah biaya transportasi kepala OPD yang berhak atas mobil dinas tapi mereka tidak mendapatkan

mobil dinas lagi agar efisien," tegasnya.

Jadi nanti mobil dinas tidak ada lagi, sehingga pekerjaan berkurang seperti menghitung penyusutan dan sebagainya. Kemudian lebih efisien dan tidak boleh beli, tidak boleh sewa, dan hanya diberikan biaya operasional. Sedangkan rumah dinas juga boleh digunakan tapi harus membayar sewa bagi kepala dinas. Tidak ada biaya pemeliharaan dan operasional rumah dinas kecuali gubernur, wakil, dan sekda saja.

"Kemudian aset-aset di daerah strategis, yang sesuai dengan kajian tidak akan menggunakannya dalam jangka panjang bagusnya diberikan Hak Pakai Lahan dan kita berikan Hak Guna Bangunan selama 30 tahun dan harus membayar antara 60-70 persen dari nilai pasar," jelasnya.

Kemudian bisa saja dikerjasamakan dengan pihak ketiga berbentuk saham, biarkan pihak ketiga membangun hotel misalnya dan Pemprov Kalbar masuk saham sehingga ada pemasukan. (oni)